

PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN GLOBAL: KAJIAN STRATEGIS DARI PERSPEKTIF NEGARA BERKEMBANG

A RATU AMANDA GADING AHMAD IQBAL

¹²³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni, 2025
Revised Juni, 2025
Accepted Juni, 2025
Available online Juni, 2025

ratumandaaa@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

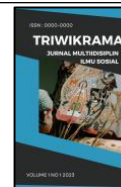
Perubahan iklim telah bergeser dari isu lingkungan menjadi ancaman nyata terhadap keamanan global, terutama bagi negara-negara berkembang yang memiliki kerentanan struktural dan keterbatasan kapasitas adaptasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara perubahan iklim dan keamanan global dari perspektif negara berkembang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, naiknya permukaan laut, dan ketidakstabilan pangan dapat mengancam stabilitas sosial-politik serta memperbesar risiko konflik. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mengelola krisis ini karena keterbatasan sumber daya, lemahnya infrastruktur, dan ketidakseimbangan dalam tanggung jawab global. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor, dan solidaritas internasional untuk menciptakan strategi ketahanan iklim yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Keamanan Global, Negara Berkembang

ABSTRACT

Climate change has shifted from an environmental issue to a real threat to global security, especially for developing countries that have structural vulnerabilities and limited adaptive capacity. This study aims to examine the relationship between climate change and global security from the perspective of developing countries, using a qualitative approach and literature review. The findings indicate that the impacts of climate change—such as droughts, floods, rising sea levels, and food insecurity—can threaten socio-political stability and increase the risk of conflict. Developing countries face significant challenges in managing this crisis due to resource constraints, weak infrastructure, and imbalances in global responsibility. This study emphasizes the importance of community-based approaches, cross-sector collaboration, and international solidarity to create fair and sustainable climate resilience strategies.

Keywords: Climate Change, Global Security, Developing Countries

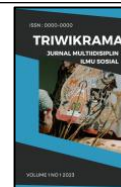


PENDAHULUAN

Fenomena perubahan iklim telah bertransformasi dari sekadar isu lingkungan menjadi krisis multidimensional yang mengancam fondasi keamanan global. Dampaknya yang pervasif melintasi batas-batas negara, mempengaruhi sistem ekologi, ekonomi, sosial, dan politik. Namun, resonansi dan intensitas ancaman ini terasa lebih akut dan mendalam bagi negara-negara berkembang. Kerentanan struktural, keterbatasan kapasitas adaptasi, dan ketergantungan pada sektor-sektor yang sensitif terhadap iklim menjadikan negara-negara ini sebagai garda terdepan yang paling merasakan dampak buruk perubahan iklim terhadap keamanan nasional dan regional mereka. Kenaikan suhu rata-rata global, yang merupakan indikator utama perubahan iklim, bukan lagi sekadar anomali statistik. Ia menjelma menjadi pemicu serangkaian disrupsi yang mengancam tatanan kehidupan. Perubahan pola curah hujan yang ekstrem, dari kekeringan berkepanjangan hingga banjir bandang yang merusak, mengganggu siklus hidrologi yang esensial bagi pertanian, ketersediaan air bersih, dan keseimbangan ekosistem. Kenaikan permukaan air laut, yang dipercepat oleh mencairnya lapisan es di kutub dan ekspansi termal air laut, mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, merusak infrastruktur vital, dan berpotensi memicu perpindahan populasi skala besar. (Legionosuko et al., 2019)

Konsekuensi langsung dari perubahan iklim ini memiliki implikasi keamanan yang mendalam. Ketidakstabilan pangan, yang dipicu oleh gagal panen akibat kekeringan atau banjir, dapat memicu kerawanan sosial, kelaparan, dan bahkan konflik perebutan sumber daya. Penurunan ketersediaan air bersih, terutama di wilayah-wilayah yang sudah mengalami tekanan air, dapat memperburuk persaingan antar kelompok masyarakat, bahkan antar negara, memicu potensi konflik hidropolitik. Bencana alam yang semakin sering dan intens tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, tetapi juga melemahkan kapasitas negara untuk memberikan layanan publik, memelihara ketertiban, dan merespons krisis. Lebih lanjut, perubahan iklim memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap kerentanan yang sudah ada (Purify, 2019). Di negara-negara berkembang, di mana kemiskinan, ketimpangan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang lemah seringkali menjadi tantangan struktural, dampak perubahan iklim dapat memperburuk kondisi ini secara signifikan. Misalnya, komunitas miskin yang bergantung pada pertanian subsisten akan menjadi yang paling terpukul oleh gagal panen, meningkatkan risiko kemiskinan ekstrem dan migrasi paksa. Sistem kesehatan yang sudah rapuh dapat kewalahan menghadapi peningkatan kasus penyakit yang terkait dengan iklim, seperti malaria, demam berdarah, dan penyakit bawaan air.

Ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di negara berkembang tidak hanya bersifat internal. Perubahan iklim dapat menjadi faktor pendorong migrasi lintas batas, menciptakan tekanan pada negara-negara tetangga dan berpotensi memicu ketegangan regional. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam yang semakin menipis akibat perubahan iklim, seperti air dan lahan subur, juga dapat menjadi sumber konflik antar negara (Anugrah, 2024). Selain itu, perubahan iklim dapat menciptakan ruang bagi aktor non-negara, termasuk kelompok pemberontak dan teroris, untuk mengeksploitasi ketidakstabilan sosial dan ekonomi, merekrut anggota baru dari populasi yang rentan, dan memperluas pengaruh mereka. Dari perspektif keamanan nasional, negara-negara berkembang menghadapi dilema yang kompleks. Mereka dituntut untuk mengatasi dampak langsung perubahan iklim terhadap lingkungan dan masyarakat mereka, sambil juga berupaya untuk mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi. Keterbatasan sumber daya finansial, teknologi, dan kapasitas kelembagaan seringkali menjadi penghalang utama dalam upaya adaptasi dan mitigasi. Tata kelola sumber daya alam yang kurang efektif, perencanaan pembangunan yang tidak responsif terhadap risiko iklim, dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat juga memperparah kerentanan.



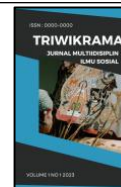
Indonesia, sebagai negara kepulauan besar dengan populasi yang signifikan dan garis pantai yang panjang, merupakan contoh nyata bagaimana perubahan iklim menjadi ancaman keamanan multidimensional. Kenaikan permukaan air laut mengancam keberadaan pulau-pulau kecil dan komunitas pesisir. Perubahan pola curah hujan menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, mengganggu produksi pangan dan ketersediaan air bersih. Bencana hidrometeorologi seperti siklon tropis dan tanah longsor semakin sering terjadi dengan intensitas yang lebih tinggi, menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda yang besar. Menyadari ancaman ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan melibatkan militer dalam upaya mitigasi bencana dan peningkatan kesiapsiagaan infrastruktur pertahanan. Namun, tantangan koordinasi lintas sektor antara lembaga pemerintah, militer, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta masih menjadi pekerjaan rumah. Keterbatasan sumber daya finansial dan teknologi juga memerlukan solusi inovatif dan kolaborasi internasional yang lebih erat. (Nasution et al., 2022)

Melalui kajian strategis yang mendalam dan berbasis bukti, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas hubungan antara perubahan iklim dan keamanan global dari perspektif negara berkembang. Pemahaman ini akan menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif, kolaborasi yang lebih kuat, dan tindakan yang lebih terarah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan global yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada Studi Hubungan Internasional

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam Hubungan Internasional, terutama sejak pandangan dunia keamanan bergeser dari pusat militer ke pendekatan yang lebih menyeluruh seperti keamanan manusia. Dalam jurnal "Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada studi Hubungan Internasional" oleh Sayyidati (2017), dijelaskan bahwa pemanasan global saat ini dipandang sebagai bahaya nyata bagi kelangsungan hidup manusia, bukan sekadar masalah lingkungan. Hal ini tampaknya menjadi perubahan utama dalam cara keamanan dicirikan, terutama dengan menciptakan negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Negara-negara berkembang, yang sebagian besar berada di belahan bumi selatan, seringkali menjadi korban paling banyak dari dampak perubahan iklim meskipun komitmen mereka terhadap arus keluar global umumnya kecil. Ketergantungan masyarakat mereka pada wilayah pedesaan dan pesisir membuat mereka lebih rentan terhadap bencana seperti musim kemarau, gelombang pasang, dan naiknya permukaan laut. Dalam sistem ini, pemanasan global tidak hanya memicu krisis ekologi, tetapi juga memperburuk ketidakseimbangan global, memperluas ketidakberdayaan finansial, dan bahkan menciptakan potensi pertikaian sosial. Adibah juga menyoroti pentingnya sekuritisasi isu-isu ekologi, khususnya bagaimana perubahan iklim diangkat ke dalam rencana keamanan global. Proses ini melibatkan aktor-aktor negara dan non-negara yang mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan universal seperti Konvensi Kyoto dan Konvensi Montreal. Akan tetapi, dari sudut pandang negara-negara berkembang, upaya-upaya ini seringkali kurang efektif karena masih terdapat kesenjangan tugas antara negara-negara maju dan berkembang. Dengan melihat pemanasan global sebagai isu keamanan, khususnya dari sudut pandang negara-negara berkembang, kita dapat melihat bahwa perubahan iklim bukan hanya tantangan ekologis, tetapi juga risiko utama yang harus ditanggapi secara serius dalam tatanan global.



Perbandingan Kebijakan Resilensi dan Adaptasi Perubahan Iklim berbasis Komunitas di Berbagai Negara

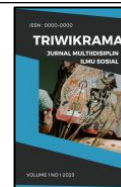
Makalah ini mengkaji bagaimana negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Fiji, Belanda, Brasil, dan Jerman merencanakan dan mengaktualisasikan pendekatan penyesuaian perubahan iklim berbasis masyarakat. Inti dari kajian ini adalah membandingkan teknik-teknik yang fleksibel dari negara-negara ini, khususnya dalam menangani tantangan-tantangan perubahan iklim di tingkat lokal. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan ini penting karena dampak-dampak perubahan iklim, seperti gelombang pasang, musim kemarau, dan naiknya permukaan laut, secara langsung melemahkan masyarakat yang rentan. Qodriyatun (2024) dan kelompok peneliti menekankan bahwa negara-negara berkembang menghadapi berbagai hambatan dalam mengaktualisasikan pengaturan penyesuaian, seperti cadangan yang terbatas, dukungan masyarakat yang lebih sedikit, dan perlunya integrasi pendekatan pusat-daerah. Contoh-contoh pengaturan seperti Kerangka Kerja Peningkatan Beras di Vietnam atau program migrasi masyarakat di Fiji menunjukkan bahwa melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan penggunaan penyesuaian adalah hal yang penting. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kelangsungan hidup tetapi juga memperkuat fleksibilitas masyarakat terhadap krisis iklim.

Strategi Perubahan Iklim

Dalam makalah “Strategi Perubahan Iklim”, San Hoesada (2022) menyoroti bagaimana krisis iklim bisa menjadi ancaman yang bahkan lebih besar daripada bencana global. Masalah ini bersifat sistemik dan kompleks, termasuk kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi, penggunaan bahan bakar fosil, dan kesenjangan global. Penulis berpendapat bahwa negara-negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat masih lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada moderasi iklim, yang memperparah dampak krisis iklim di negara-negara berkembang. Makalah ini menekankan bahwa negara-negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi tantangan ganda: tingginya kerentanan terhadap bencana iklim dan terbatasnya sumber daya untuk adaptasi. Dampak seperti naiknya permukaan laut, gelombang panas yang ekstrem, dan ancaman terhadap ketahanan pangan telah menimbulkan ancaman yang sama terhadap ketahanan manusia. Strategi global seperti Kesepakatan Paris dan Konvensi Kyoto dianggap tidak cukup untuk membendung laju kerusakan, terutama jika tidak diikuti oleh komitmen nyata dari negara-negara besar. Hoesada juga membahas mengenai teknik Indonesia dalam menghadapi situasi darurat ini, seperti pelaksanaan estimasi karbon, perpindahan ke sumber energi terbarukan, dan keterlibatan sektor swasta melalui instrumen pembiayaan campuran. Akan tetapi, ia menyoroti tantangan budaya dan pengaturan moneter yang masih berlaku dalam mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Hal ini mencerminkan dilema umum di negara-negara berkembang: antara menjaga stabilitas keuangan dan beradaptasi dengan bahaya perubahan iklim yang semakin nyata. Tulisan ini memperkuat posisi bahwa perubahan iklim dapat menjadi risiko keamanan global, yang membutuhkan pendekatan utama lintas sektor dan negara. Negara-negara berkembang harus membangun kerangka kerja yang tahan iklim yang berkelanjutan tanpa terjebak dalam ketergantungan bahan bakar fosil dan pendekatan global yang tidak bersahabat.

1. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada penyelidikan konseptual dan interpretatif terhadap fenomena perubahan iklim sebagai ancaman terhadap keamanan global,



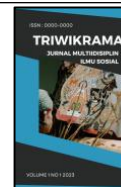
hususnya dari sudut pandang negara berkembang. Dalam penelitian ini, penulis tidak mengumpulkan data lapangan, tetapi menyelidiki meneliti, dan membandingkan berbagai sumber tertulis yang signifikan. Sumber data terbanyak berasal dari artikel ilmiah, jurnal ilmiah, laporan dari lembaga pendidikan dunia seperti IPCC, serta laporan lembaga dan pernyataan resmi dari pemerintah atau organisasi dunia yang terkait dengan perubahan iklim dan keamanan. Penulis juga menganalisis pendekatan dan reaksi negara berkembang terhadap isu perubahan iklim melalui penelitian jurnal dan laporan yang menggambarkan studi kasus dari berbagai negara. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan menggambarkan substansi dan makna data yang telah dikumpulkan, kemudian menguraikannya berdasarkan hipotesis keamanan manusia dan studi hubungan internasional. Inti dari penelitian ini adalah bagaimana perubahan iklim dianggap sebagai isu keamanan non-tradisional, dan bagaimana negara-negara berkembang menanggapi dalam konteks keterbatasan sumber daya dan ketidakseimbangan global. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan prosedur negara-negara berkembang dalam mengelola perubahan iklim sebagai ancaman yang tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga penting dan multidimensi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan menggambarkan substansi dan makna data yang telah dikumpulkan, kemudian menguraikannya berdasarkan hipotesis keamanan manusia dan studi hubungan internasional. Inti dari penelitian ini adalah bagaimana perubahan iklim dianggap sebagai isu keamanan non-tradisional, dan bagaimana negara-negara berkembang menanggapi dalam konteks keterbatasan sumber daya dan ketidakseimbangan global. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan prosedur negara-negara berkembang dalam mengelola perubahan iklim sebagai ancaman yang tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga penting dan multidimensi.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan iklim sebagai ancaman keamanan global telah memicu pergeseran pandangan dunia dalam pemikiran keamanan global. Jika sebelumnya keamanan dipahami dengan kendali militer dan ancaman antarnegara, kini konsep tersebut telah berkembang menjadi lebih komprehensif dan multidimensi. Ancaman non tradisional seperti bencana alam, kekurangan sumber daya, penyebaran penyakit, dan keterbatasan pergerakan akibat degradasi lingkungan kini dikenal sebagai faktor yang dapat membahayakan stabilitas suatu negara. Negara-negara berkembang yang umumnya memiliki tingkat kerentanan sosial yang lebih tinggi merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh krisis ini. Yang mengejutkan, kelompok ini juga merupakan yang paling terbatas dalam hal kemampuan pemulihan dan adaptasi, baik secara finansial, teknis, maupun organisasi. Ketergantungan mereka pada sektor ekonomi yang sensitif terhadap perubahan iklim, seperti pertanian dan perikanan, membuat ancaman yang mereka hadapi semakin besar dan kompleks.

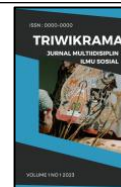
Dalam penelitian sebelumnya, menurut San Hoesada (2022), menunjukkan bahwa negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan sistemik dalam menangani darurat iklim. Fondasi terbuka seperti sistem air, kerangka sanitasi, dan transportasi biasanya tidak direncanakan untuk menahan dampak progresif dari peristiwa iklim yang luar biasa. Selain itu, anggaran negara yang terbatas, akses ke inovasi rendah karbon, dan sumber daya manusia yang terbatas memperparah tantangan dalam membangun kerangka kerja yang layak dan fleksibel. Dampak nyata seperti gelombang pasang yang terus-menerus, musim kemarau yang berkepanjangan, naiknya permukaan laut, dan perubahan iklim secara langsung melemahkan ketahanan pangan, pasokan air bersih, kesehatan masyarakat, dan menciptakan kerentanan sosial-politik. Dalam konteks ini, perubahan iklim tidak hanya memperparah



keadaan darurat yang ada tetapi juga kapasitas sebagai "pengganda ancaman" yang sekaligus membebani kekuatan masyarakat dan pemerintah. Kasus Indonesia menunjukkan gambaran yang jelas tentang bagaimana dampak perubahan iklim menyebar ke berbagai divisi kehidupan dan keamanan nasional. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, Indonesia menghadapi risiko tinggi naiknya permukaan air laut, yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil dan mengakibatkan hilangnya rumah, pekerjaan, dan bahkan wilayah penting. Di sisi lain, frekuensi dan eskalasi bencana hidrometeorologi seperti gelombang pasang, longsor, dan musim kemarau yang ekstrem terus meningkat. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan respons awal melalui pengaturan bantuan bencana, mengembangkan kerangka kerja peringatan dini, dan melibatkan militer dalam respons krisis. Namun, tantangan dalam koordinasi lintas sektor, mencakup spesialis antar pendidikan, dan ketidakseimbangan dalam akses ke data dan inovasi di daerah yang sulit dijangkau merupakan penghalang utama yang mengurangi keefektifan respons. (Qodriyatun, 2024)

Pada tingkat global, kesepahaman multilateral seperti Kesepakatan Paris sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi keinginan negara-negara berkembang. Komitmen subsidi dan pertukaran inovasi dari negara-negara berkembang yang dijamin dalam berbagai pertemuan iklim global sering kali tidak terwujud seperti yang diharapkan. Sebenarnya, negara-negara berkembang memiliki tugas otentik yang luas dalam mendorong pengumpulan emisi gas rumah kaca global. Ketimpangan ini tidak hanya memperlambat proses pergerakan energi dan penyesuaian di negara-negara berkembang, tetapi juga meningkatkan potensi tekanan geopolitik yang tidak digunakan, terutama ketika persaingan atas aset yang semakin langka semakin jelas. Dalam konteks ini, pendekatan penyesuaian berbasis komunitas merupakan salah satu teknik yang telah terbukti berhasil dan relevan (Sayyidati, 2017). Contoh dari Vietnam dan Fiji menunjukkan bahwa melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pengaturan penyesuaian dapat menghasilkan solusi yang lebih ekonomis yang ditetapkan dalam kebutuhan nyata masyarakat. Di negara-negara berkembang, pertunjukan ini dapat menjadi pintu gerbang untuk memperkuat keragaman sosial, ekonomi, dan lingkungan pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, dukungan pengaturan yang solid, kapasitas organisasi yang memuaskan, dan pengakuan akan pentingnya keadilan iklim sebagai aturan mendasar dalam membangun metodologi penyesuaian diperlukan. Negara-negara berkembang harus memajukan pendekatan dari bawah ke atas yang memberi ruang bagi para tokoh lokal untuk secara efektif mengambil bagian dalam membangun kerangka kerja fleksibilitas iklim yang adil, komprehensif, dan jangka panjang.

Secara lebih luas, penting untuk dipahami bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya bersifat fisik atau alami, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya keresahan sosial, bahkan pertikaian, dan keadaan darurat kemanusiaan. Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya penting seperti air dan makanan, potensi terjadinya tekanan sosial, perebutan sumber daya, dan bahkan radikalisasi meningkat secara keseluruhan. Kondisi ini diperburuk oleh melemahnya kapasitas negara untuk menyediakan jaminan yang memadai dan layanan publik setelah bencana, terutama di daerah yang sulit diakses atau miskin infrastruktur. Di sinilah pentingnya membangun kapasitas negara dan layanan iklim yang responsif terhadap dimensi keamanan manusia secara umum. Kondisi ketidakseimbangan global dalam penanganan perubahan iklim juga menciptakan kesenjangan mendasar antara negara maju dan berkembang. Sementara negara maju memiliki sumber daya untuk membangun kerangka kerja yang tangguh terhadap iklim dan kerangka kerja jaminan sosial yang kuat, negara berkembang sering kali berada dalam posisi reseptif dan tidak punya pilihan selain menerima dampak terburuk dari perubahan iklim. Biasanya menjadi tantangan dalam pertemuan di seluruh dunia, karena hubungan geopolitik dan finansial seringkali mengalahkan kepentingan solidaritas iklim global. Negara-negara berkembang juga dihadapkan pada masalah antara menuntut tugas global dan memperkuat kapasitas rumah tangga secara bebas di tengah hambatan yang ada.



Dalam hal ini, teknik penyesuaian tidak dapat hanya berpusat pada sudut pandang khusus, tetapi harus menggabungkan pengukuran sosial, keuangan, dan organisasi. Negara-negara berkembang harus membangun fleksibilitas berdasarkan informasi lingkungan, memperkuat sistem sosial, dan mengkoordinasikan bahaya iklim ke dalam semua tahap perencanaan pembangunan. Pendekatan lintas sektor dan lintas aktor adalah kuncinya, di mana pemerintah, masyarakat yang terhormat, akademisi, dan sektor swasta harus bergerak dengan visi yang sama untuk membentuk kerangka kerja yang mampu menahan guncangan dan pulih lebih cepat dari bencana. Pada akhirnya, penelitian ini menekankan bahwa perubahan iklim sekarang tidak dapat dilihat sebagai masalah alamiah saja, tetapi sebagai masalah keamanan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Bagi negara-negara berkembang, tantangan ini dapat menjadi titik balik untuk memperkuat kapasitas nasional, memperjuangkan keadilan global, dan membangun solidaritas yang belum pernah digunakan dalam menghadapi bahaya iklim transnasional dan lintas generasi. Dengan merangkul sudut pandang keamanan yang lebih menyeluruh, dipercaya bahwa pendekatan iklim tidak hanya akan melindungi alam, tetapi juga menjaga kemuliaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup individu di negara-negara yang paling tidak berdaya.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perubahan iklim dapat menjadi ancaman keamanan multidimensi yang paling terasa di negara-negara berkembang. Isu ini tidak hanya menyangkut keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mencakup dampak langsung pada ketahanan pangan, kesejahteraan sosial-politik, kesejahteraan umum, dan meningkatkan potensi konflik karena perebutan sumber daya yang semakin terbatas. Negara-negara berkembang, yang seringkali memiliki infrastruktur yang rapuh dan tingkat ketergantungan yang tinggi pada kelompok-kelompok yang rentan terhadap iklim, menghadapi tantangan besar dalam menanggapi krisis ini di tengah keterbatasan kapasitas ekonomi, teknologi, dan organisasi. Meskipun ada upaya dari dalam negeri dan melalui berbagai mekanisme internasional seperti Persetujuan Paris, penerapan prosedur moderasi dan penyesuaian masih belum sepadan dengan besarnya risiko yang dihadapi. Banyak solusi yang masih bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya terarah ke pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen global yang lebih kuat untuk mengatasi kesenjangan dampak dan perbedaan kapasitas negara-negara berkembang, guna menciptakan partisipasi global yang lebih adil, komprehensif, dan layak.

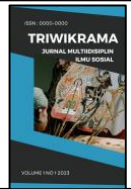
Saran

Untuk mengatasi kompleksitas perubahan iklim sebagai risiko keamanan di negara-negara berkembang, diperlukan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan jangka panjang. Negara-negara berkembang harus memperkuat kapasitas serbaguna mereka melalui pembangunan kerangka kerja fleksibilitas berbasis masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas kesadaran terbuka tentang bahaya iklim, memperkuat pendidikan lingkungan, dan memberdayakan dukungan masyarakat yang dinamis dalam perencanaan dan pelaksanaan pengaturan iklim.

Selain itu, pemerintah negara-negara berkembang harus membangun instrumen koordinasi lintas sektor yang lebih efektif untuk mengkoordinasikan isu-isu perubahan iklim menjadi motivasi pembangunan nasional. Harus ada kolaborasi antara pendidikan negara, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat yang ramah dalam merencanakan pengaturan yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan iklim. Dalam konteks global, sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan komitmen negara-negara maju dalam hal dukungan iklim dan pertukaran inovasi, dan untuk memastikan

*Corresponding author

E-mail addresses: ratumandaaa@gmail.com



bahwa kelompok-kelompok universal benar-benar menjadi ruang yang wajar untuk menyuarakan antarmuka negara-negara yang paling rentan. Tanpa dukungan global yang nyata dan layak, negara-negara berkembang akan terus berada dalam posisi yang tidak setara dalam menghadapi bahaya perubahan iklim. Dengan demikian, teknik-teknik yang diciptakan tidak boleh hanya berpusat pada respons bencana, tetapi juga mencakup manajemen penguatan, keadilan sosial, dan kemajuan ekonomi sebagai landasan untuk membangun masa depan yang lebih fleksibel terhadap perubahan iklim.



4. DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, A. R. S. (2024). Resilience Building in BIMP-EAGA Region: Memahami Dampak Perubahan Iklim dan Strategi Adaptasi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hummaniora*, 8(3), 1413.
<https://doi.org/10.31604/jim.v8i3.2024.1422-1435>
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim guna Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 295. <https://doi.org/10.22146/jkn.50907>
- Nasution, S. A., Waryenti, D., & Muthia, A. A. (2022). PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PERJANJIAN PARIS 2015. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(2).
<https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.25067>
- Purify, A. (2019). PERUBAHAN IKLIM DAN RISIKO KEAMANAN NASIONAL: KAJIAN MENGENAI KESIAPSIAGAAN PERTAHANAN INDONESIA. *JURNAL ELEKTROSISTA*, 12(1).
- Qodriyatun, S. N. (2024). Perbandingan kebijakan resiliensi dan adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas di berbagai negara. *FOREIGN LEGISLATION ANALYSIS*.
- San Hoesada, S. D. (2022). *Strategi Perubahan iklim*.
- Sayyidati, A. (2017). Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada Studi Hubungan Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1).
<https://doi.org/10.18196/hi.61103>